

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BARAT

Olch:

LILI RAMAHDANI 05 151 063

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1)

> PADANG 2009

No. Alumni Universitas

Lili Ramahdani

No.Alumni Fakultas

a) Tempat/tgl lahir: Jakarta/19 Mei 1986 b) Nama Orang Tua: Syamsir Latief dan Asmita Khaidir c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Ilmu Ekonomi c) No.BP: 05 151 063 f) Tgl lulus: 12 November 2009 g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,33 i) Lama Studi: 4 tahun 2 bulan j) Alamat Orang Tua: Jr. Timbulun No. 30a Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok, Sumatera Barat.

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiscal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat

Skripsi S1 Oleh Lili Ramahdani Pembimbing Drs. Zulkarnaini Ras Msc

ABSTRAK

Perdebatan keterkaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah sering dikemukan oleh para peneliti. Hasil penelitian pengaruh desentralisasi fiscal dan pertumbuhan ekonomi terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda dari setiap peneliti baik positif, negatif, signifikan dan tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal yang mulai dilaksanakan pada Januari 2001 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model OLS (Ordinary Least Square), dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable independent, kontribusi PAD terhadap TPD dan Total Pengeluaran Pemerintah sebagai variable dependent. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan (PAD/TPD) memberikan kontribusi positif dan signifikan namun, total pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negative (signifikan dan tidak signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tanda Tangan-	- N	Low	
Nama Terang	Drs. Zulkamaini Ras	Febriand Prim Putra	Fery Andrianus SE, MS

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

NIP.130812952

N. II. In I	Petugas Fakultas /Universitas Andalas	
No.Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No.Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

Tanda Tangan

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru (Orba) telah membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Kenyataan menunjukkan, Orde Baru telah berhasil menurunkan hiperinflasi, mendatangkan investasi luar negeri yang memberikan banyak dampak postif untuk pertumbuhan ekonomi, mempertahankan harga beras hingga mencapai swasembada pangan dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, pembangunan ekonomi yang dilakukan di era Orba ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global, akumulasi kapital hanya dimiliki oleh segelintir orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan, kebijakan yang sentralistik menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah, selain itu sektor-sektor yang seharusnya menjadi fundamental ekonomi Indonesia tidak dibangun sebagaimana mestinya. Krisis ekonomi yang terjadi di pertengahan tahun 1997 menyebabkan perekonomian Indonesia kembali terpuruk, nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah tajam, hutang pemerintah maupun swasta meningkat dua hingga tiga kali lipat, pemutusan tenaga kerja terjadi secara besar-besaran, akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berubah menjadi negative yakni sebesar -0.39 pada tahun 1998. Jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 1999 kembali bertambah menjadi 23.43 persen dan dari sisi jumlah ini menyamai keadaannya ditahun 1978 sebesar 48 juta orang.

Bagi Sumatera Barat krisis ekonomi menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 51.17 milyar pada tahun 1998 menjadi hanya Rp 48.67 milyar pada tahun 1999. Penurunan terjadi pada penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah. Keadaan mencerminkan dampak kelesuan kegiatan perekonomian daerah sejak krisis ekonomi. Jumlah PAD yang relatif rendah memperlihatkan kendala yang dihadapi pemerintah daerah memacu kegiatan pembangunan.

Pendapatan perkapita riil masyarakat Sumatera Barat pada awalnya mengalami penurunan drastis karena rendahnya tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingginya tingkat inflasi. Keadaan ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin yang mencapai angka 13,2% dari jumlah penduduk Sumatera Barat atau sekitar 601.500 orang pada tahun 1999.

Krisis ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menimbulkan gejolak politik sebagai kritik dari system sentralistik, sehingga pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang pemrintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan lahirnya UU tersebut merupakan awal dari perubahan system pemerintahan Indonesia dari sentralistik ke desentralistik (otonomi daerah) dengan harapan kehidupan Indonesia yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh William, Vinod, Vyasulu (2004) Desenralisasi diharapkan dapat meningkatkan prospek untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bila mengarah kepada perubahan struktur politik, meningkatkan tata kelola atau perubahan sikap pemerintah terhadap masyarakat miskin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris diperoleh bahwa derajat desentralisasi fiscal daerah otonom memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan proporsi PAD terhadap TPD mengindikasikan bahwa daerah-daerah terus mengalami kemajuan dalam perekonomiannya, sehingga pungutan yang bisa dikenakan pada masyarakat meningkat pula.

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

• Pada umumnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebagai daerah tingkat I mengalami pertumbuhan positif, kecuali tahun 1999 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan tahun 2004 yang dikarenakan oleh pemekaran yang dilakuan dibeberapa daerah. Begitu pula pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat pada umumnya selalu mengalami pertumbuhan, kecuali tahun 2000 dan 2003 pada kabupaten Padang Pariaman dan tahun 2004 pada daerah kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Pasaman. Hal ini disebabkan karena kabupaten tersebut mengalami pemekaran wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai Nobuo Dan Masayo Sakata, 2002. Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State- Level Cross-Section Data For The United States. Jurnal Of Urban Economic.
- Bahl, Roy W, Dan Shyam Nath, 1986. Public Expenditure Decentralisasi In Developing Countries. www.worldbank.org
- Barro R. 1990. Government Spending In A Simple Model Of An Endogenous Growth, Journal Of Political Economy.
- Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Synopsis Pengantar Ekonomi. No 4. Yogyakarta: BPFE.
- BPS, 1996-2005. Statistic Keuangan Daerah Indonesia. Jakarta.
- BPS, 1996-2005. PDRB Sumatera Barat Berdasarkan Lapangan Usaha. Padang
- Davoodi Hamid Dan Hengfu Zou, 1998. Fiscal Decentralization And Growth. Journal Of Urban Economic.
- Dornbusch Rudiger, Fischer Stanley Dan Startz Richard. 2004. Makroekonomi Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Pt Media Global Edukasi.
- Gudjarati, D. 1999. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan M. L. 2000. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jin Jing Dan Heng Fu Zou. 2000. Fiscal Decentralization And Economic Growth In China. Development Research Group The Worldbank
- Khasanah Vivi Ukhwatul. 2004. Desentralisasi Fiscal Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Antar Daerah Indonesia). Skripsi. Unand.
- Kuncoro Mudrajat. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah (Refoormasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang). Jakarta: Erlangga.
- Lin Justin Yifu Dan Liu Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization And Economic Growth In China. Economic Development And Cultural Change. Uniform Global. The University Of Chicago.
- Makmun, Purwiyanto Dan Wibowo Tri. 2004. Potret Perekonomian Daerah Sebelum Dan Era Desentralisasi Fiscal. Kajian Ekonomi Dan Keuanan Volume 8 No 4.